

Pernyataan 'Garis Keras' Tuai Kontroversi,

Mahfud Minta Maaf

CNN Indonesia | Rabu, 01/05/2019 12:55 WIB



Mantan Ketua MK Mahfud MD kini dikenal sebagai Ketua gerakan Suluh Kebangsaan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar Hukum Tata Negara, [Mahfud MD](#), melontarkan permintaan maaf terhadap mereka yang telah salah memahami pernyataannya soal sebaran kemenangan paslon nomor urut 02 dalam [Pilpres 2019](#) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ada di daerah yang diidentifikasi sebagai provinsi garis keras dalam hal agama.

"Arti garis keras di dalam literatur 'is an adjective describing a stance on an issue that is inflexible and not subject to compromise'. Arti ini tak bisa dicabut karena sudah jadi term dalam ilmu politik secara internasional. Tapi bagi yang salah memahami penggunaan istilah ini saya minta maaf," demikian kicauan Mahfud lewat akun media sosial Twitter-nya, Rabu (1/5) pada pukul 6.35 WIB.

Itu adalah bagian akhir dari rangkaian twit yang Mahfud buat soal klarifikasi atas pernyataan daerah garis keras yang menjadi kontroversi tersebut. Ada empat twit dalam rangkaian tersebut.

Pertama, Mahfud menjelaskan bahwa istilah garis keras atau hard liner itu harus diartikan sikap yang kokoh, tidak mau berkompromi dengan pandangan yang dianggapnya tidak sejalan dengan prinsipnya.

"Itu tertulis di literatur-literatur. Tapi, bagi yang beda paham saya minta maaf. Maksud

saya mengajak rekonsiliasi, bersatu, kok malah berpecah. Itu tidak bagus," keluh Mahfud.

Lihat juga: [Sejarawan Bela Mahfud MD soal Basis Prabowo 'Garis Keras'](#)

Mahfud pun enggan memperpanjang polemik itu karena tak mau dituding mau membelokkan isu dari kecurangan pemilu.

"Mari kita kawal saja bersama-sama proses pemilu ini karena jalannya masih panjang. Semua harus mendapat keadilan sesuai tuntutan demokrasi. Demokrasi harus selalu diimbangi hukum (nomokrasi)," saran pria yang kini dikenal sebagai Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan tersebut.



Mahfud MD@mohmahfudmd

[Replying to @mohmahfudmd](#)

Daripada sy dituding "mau membelokkan isu" dari kecurangan pemilu maka sy takkan memperpanjang polemik. Mari kita kawal sj ber-sama2 proses pemilu ini krn jalannya msh panjang. Semua hrs mendapat keadilan sesuai tuntutan demokrasi. Demokrasi hrs selalu diimbangi hukum (nomokrasi)



Mahfud MD@mohmahfudmd

Arti garis keras di dlm literatur " is an adjective describing a stance on an issue that is inflexible and not subject to compromise". Arti ini tak bs dicabut krn sdh jd term dlm ilmu politik scr internasional. Tp bg yg salah memahami penggunaan istilah ini sy minta maaf.

Pernyataan Mahfud itu diketahui dalam potongan rekaman video yang dibagikan di Twitter. Dalam pernyataannya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 sulit dibantah.

Sementara perolehan suara Prabowo-Sandiaga di beberapa daerah, dianggap Mahfud berasal dari daerah Indonesia yang identik dengan agama garis keras. Mahfud membahas hal ini terkait dengan wacana rekonsiliasi usai Pilpres 2019.



 2019 Prabowo Sandi@syarif_alkadrie

Ucapan @mohmahfudmd ini sdh mengandung unsur provokasi:

1. Propinsi dimana suara O1 kalah, sbg daerah agama garis keras.
2. Menganggap suara O1 tdk bisa dikalahkan saat ini, pdhl itu msh melihat data di situng KPU bkn perhitungan manual.

Ini pakar hukum atau timses sih?

Pernyataan Mahfud itu pun lalu 'disambar' Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Said Didu.

Pada 27 April lalu, lewat akun Twitter-nya, Said mmeminta Mahfud menjelaskan indikator yang digunakan sehingga menuduh orang-orang garis keras tersebut.

 2019 Prabowo Sandi@syarif_alkadrie

· [Apr 28, 2019](#)

Ucapan @mohmahfudmd ini sdh mengandung unsur provokasi:

1. Propinsi dimana suara O1 kalah, sbg daerah agama garis keras.
2. Menganggap suara O1 tdk bisa dikalahkan saat ini, pdhl itu msh melihat data di situng KPU bkn perhitungan manual.

Ini pakar hukum atau timses sih?



 Muhammad Said Didu@msaid_didu

Mohon maaf prof @mohmahfudmd, saya berasal dari Sulsel, mhn jelaskan indikator yg prof gunakan sehingga menuduh orang Sulsel adalah orang2 garis keras agar jadi bahan pertimbangan kami.

Kami orang Sulsel memang punya prinsip SIRI utk menjaga kehormatan. Inikah yg dianggap keras ?

[12:37 AM - Apr 28, 2019](#)

Atas pernyataan Said Didu tersebut, pada 28 April lewat akun Twitter-nya, Mahfud menjawab, "Garis keras itu sama dengan fanatik dan sama dengan kesetiaan yang tinggi.

Itu bkn hal yang dilarang, itu term politik. Sama halnya dengan garis moderat, itu bukan hal yang haram. Dua-duanya boleh dan kita bisa memilih yang mana pun. Sama dengan bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau."

Lihat juga: [Eks Panglima GAM Sebut Pernyataan Mahfud Sakiti Rakyat Aceh](#)

(kid/asa)

Mahfud MD Minta Maaf

Rabu , 01 Mei 2019 | 11:20



Sumber Foto Medcom.id Prof. Dr Mahfud MD

JAKARTA--Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD akhirnya menyampaikan permohonan maaf terkait ucapannya yang menyebut daerah yang dimenangkan capres Prabowo Subianto dulunya dianggap "provinsi garis keras".

Permintaan maaf itu disampaikan Mahfud melalui akun Twitter-nya, @mohmahfudmd pada Rabu (1/5/2019). Dia beralasan supaya istilah tersebut tidak terus menjadi polemik di tengah masyarakat.

"Arti garis keras di dalam literatur 'is an adjective describing a stance on an issue that is inflexible and not subject to compromise'. Arti ini tak bisa dicabut karena sudah jadi term dalam ilmu politik secara internasional. Tapi bagi yang salah memahami penggunaan istilah ini saya minta maaf," tulis Mahfud, seperti dikutip *rri.go.id*.

Selain itu, Mahfud juga khawatir penyebutan istilah provinsi garis keras itu dituding pihak lain sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian publik atas hasil pemilu serentak yang dinilai kubu Prabowo telah terjadi kecurangan.

"Daripada saya dituding 'mau membelokkan isu' dari kecurangan pemilu maka saya takkan memperpanjang polemik. Mari kita kawal saja bersama-sama proses pemilu ini karena jalannya masih panjang. Semua harus mendapat keadilan sesuai tuntutan demokrasi. Demokrasi harus selalu diimbangi hukum (nomokrasi)," jelasnya.

Sumber Berita:rri.go.id